

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi (Jayadinata,1999:31), dan dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan.

Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya pemberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarti penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang disertai tugas dan wewenang melaksanakan,

memantau, atau menjaga program pembangunan di wilayahnya. Dengan menguatnya kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat yang diterima dan dipercaya oleh warga masyarakatnya, jika program pembangunan diserahkan pelaksanaannya kepada lembaga tersebut, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tergolong tinggi. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Namun diperlukan kemampuan pemerintah untuk menetapkan sektor-sektor yang dapat diserahkan pembangunan dan pengelolannya kepada masyarakat, serta bantuan perangsang yang harus diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk menumbuhkembangkan partisipasi dalam pembangunan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan partisipasi itu sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat

Dari uraian-uraian di atas, maka penulis mengajukan judul skripsi ini : **“Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Drainase di Kecamatan Medan Tembung”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Menurut Mohammad Hatta (200:14) : “Masalah adalah kejadian dan keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah terdapat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kegiatan pembangunan perawatan drainase di Kecamatan Medan Tembung”.

### **C. Pembatasan Masalah**

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh R.A. Suhardi (2011:1) adalah : “Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan”.

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan yang telah diuraikan terdahulu maka perlu pula dilakukan atas masalah yang diajukan agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang batasan dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun pembatasan masalah tersebut :

1. Bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan drainase di Kecamatan Medan Tembung?
2. Ruang lingkup penelitian pada Kecamatan Medan Tembung?
3. Tahun penelitian adalah periode tahun 2013.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan drainase.
2. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya secara ilmiah, sehingga dapat diterapkan secara sederhana mungkin.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Medan Tembung.

2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Medan Area.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang dimaksud adalah mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat dimana masyarakat ikut berpartisipasi mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab.

Dalam pembangunan, hal tersebut adalah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah desa beserta aparatnya didalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

### **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi miah perlu dibuktikan.

Kartini Kartono (2000:70) mengatakan bahwa hipotesis itu adalah : “Hipotesis masih berisikan jawaban bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diutarakan dari suatu kegiatan melalui riset dan hipotesis itu akan diterima jika faktanya benar”

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah :”Semakin besar partisipasi masyarakat maka semakin meningkat pembangunan fisik drainase di Kecamatan Medan Tembung”.